

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin., 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Beratha, I Nyoman, 1982, *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Busroh, Abu Daud, 2009, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2007, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus dan Riza Noer Arfani, 2003, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Hakim, Lukman, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang.
- Harsono, 1992, *Hukum Tata Negara: Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa*, Liberty, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung.

- Joeniarto, R., 1976, *Perkembangan Pemerintah Lokal*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Almunir, Bandung.
- Kaho, Josef Riwu, 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kaloh, J., 2009, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartohadikusuma, Soetardjo, 1984, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1964, *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini*, Penerbit Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2004, *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Muluk, M. R. Khairul, 2009, *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, ITSPress, Surabaya.
- Ndraha, Talidzuhu, 1981, *Dimensi Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ridwan, HR., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV Jilid 1 tentang Kekuasaan Pemerintahan Daerah*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Simorangkir, Bonar, 2000, *Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Pustaka Sinar Harapan dan Harian Suara Pembaruan, Jakarta.

Soehino, 1980, *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sunarno, Siswanto, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Surianingrat, Bayu, 1980, *Desa dan Kelurahan menurut UU No. 5/1979*, Penerbit X, Jakarta.

Hamid, Edy Suwandi, dan Sobirian Malian, 2004, *Memperkokoh Otonomi Daerah: Kebijakan, Evaluasi dan Saran*, UII Press, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, H. A. W., 2003, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yasin, Muhammad, Ahmad Rofik, Fahurrahman, Bejo Untung, Maya Rostanty, Setyo Dwiherwanto, Iskandar Saharudin, dan Fitria Muslih, 2015, *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta.

Yudoyono, Bambang, 2001, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggita DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

B. Hasil Penelitian

Hoessein, Bhenyamin, 1993, *Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II*, Disertasi, Pascasarjana UI, Jakarta.

Marx, Susan, and Asha Ghosh, 2014, *Local Governance Police Brief: Comparative Review of Village Governance in Cambodia, Indonesia, Papua New Guinea, and the Philippines*, The Asia Foundation, Timor-Leste.

Mulyono, Sutrisno Purwohadi, *Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Warren, Carrol, 1990, *The Bureaucratisation of Local Government in Indonesia*, The Centre of Southeast Asian Studies Monash University, Australia.

C. Artikel Jurnal

Handrisal, “Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa (Studi Kasus Pemekaran Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga)”, *RAT Journal*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2012.

Sanjaya, William., “Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, Juni 2015.

D. Makalah

Eko, Sutoro, “Desentralisasi dan Demokrasi Desa”, *Konsultasi Publik Revisi UU No. 22 Tahun 1999*, Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) Jakarta, Bitra Indonesia Medan, dan Pustaka Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara, 19 November 2003.

Eko, Sutoro, “Mempertegas Posisi Politik dan Kewenangan Desa”, *Sarasehan Nasional Menggagas Desa Masa Depan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), dan Democratic Reform Support Program (DRSP) USAID*, Jakarta, 3-4 Juli 2006.

Sodiki, Achmad, “Konstitusionalitas Masyarakat Adat dalam Konstitusi”, *Simposium Keberadaan Masyarakat Adat sebagai Subyek Hukum, HuMa, dan Epistema Institute*, Jakarta, 27-28 Juni 2012.

E. Artikel Internet

P., Badauni A., “Dana Desa Picu Kecemburuan Aparat Kelurahan”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/13/058700194/dana-desa-picu-kecemburuan-aparat-kelurahan>, diakses tanggal 25 Desember 2015.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <http://kbbi.web.id/desa>, diakses tanggal 29 Januari 2016

Suparman, Fana, “Pengawasan Rendah, Pengelolaan Dana Desa Rawan Dikorupsi”, <http://beritasatu.com/hukum/282083-pengawasan-rendah-pengelolaan-dana-desa-rawan-dikorupsi.html>, diakses 30 Juni 2016.

Suryono, Trianto Hery, 2014, Dampak UU Desa Kelurahan Diusulkan Menjadi Desa, [http://www.koran-o.com/2014/solopolitan/dampak-uu-des-48302](http://www.koran-o.com/2014/solopolitan/dampak-uu-desa-kelurahan-diusulkan-menjadi-des-48302), diakses tanggal 26 April 2016.

Hr, “Mulai 2017, Pemko Batam Siapkan Rp 1 Miliar per Kelurahan”, *harianhaluan.com/mobile/detailberita/51796/mulai-2017-pemko-batam-siapkan-rp1-miliar-per-kelurahan*, diakses tanggal 20 April 2016.

Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (MAP UGM), “Seri I Identitas Desa Nussantara Melacak Asal Usul Desa Nusantara Tumbuh Alamiah atau Konstruksi Kolonial”, [http://www.map.ugm.ac.id/index.php/component/content/article /20-map-corner/153-melacak-asal-usul-des- nusantara-tumbuh-alamiah-atau-konstruksi-sosial](http://www.map.ugm.ac.id/index.php/component/content/article/20-map-corner/153-melacak-asal-usul-des- nusantara-tumbuh-alamiah-atau-konstruksi-sosial), diakses tanggal 7 Juni 2013.

Sutriyono, Edy, dan Titis, W. , “Dikeluhi Warganya, Lurah Mlati Norowito Segera Lakukan Perbaikan Jalan”, [http://www. murianews.com/2015/11/17/60159/dikeluhi-warganya-lurah-mlati-norowito-segera-lakukan-perbaikan-jalan.html](http://www.murianews.com/2015/11/17/60159/dikeluhi-warganya-lurah-mlati-norowito-segera-lakukan-perbaikan-jalan.html), diakses tanggal 25 Desember 2015.

F. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539).

Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 334 Tahun 2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2015).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

G. Putusan Badan Peradilan

Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

H. Lain-Lain

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/Sj tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.